

**KEPENTINGAN INDONESIA DALAM MENGGAGAS PERUNDINGAN *REGIONAL
COMPREHENSIVE ECONOMY PARTNERSHIP***

Oleh:

Dedi Parna

Pembimbing : Irwan Iskandar S,IP.MA

Email:

Bibliografi : 6 Buku, 4 Skripsi, 32 Website, 2 Dokumen

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru-Pekanbaru 28293Telp. (0761) 63277, 23430

Abstract

This research will explain about the benefit to be achieved by Indonesia in RCEP negotiations initiated within the framework of ASEAN upon its leadership in ASEAN. Negotiations is to discuss the free trade agreements between ASEAN and ASEAN cooperation partners who were previously part of the ASEAN Plus 1

trade cooperation. The negotiations initiated because the WTO has failed in formulating multilateral trade rules in the Doha round. This study will also be discussed on how the challenges and opportunities for Indonesia RCEP. This research is a study using research methods literature study. This study uses perspectives and theories of liberalism and the concept of national interest expressed by Jack C. Plano and Olton Roy.

The results of this study indicate that Indonesia RCEP initiated in 2011 is to increase trade Indonesia because RCEP high economic potential and Indonesia wants to increase cooperation, especially in the field of small and medium enterprises (SMEs). Opportunities provided by RCEP is the ease in obtaining industrial raw materials more efficiently and quite promising.

Keywords: Regional Cooperation Economic Partnership, Cooperation, National Interest

PENDAHULUAN

Penelitian ini merupakan kajian ilmu hubungan internasional yang akan fokus dalam mengkaji masalah ekonomi politik internasional. Penelitian ini akan berupaya untuk mengkaji tujuan maupun kepentingan Indonesia dalam menggagas perundingan dan pembentukan regionalisasi maupun mega regionalisasi di kawasan ASEAN yaitu perundingan *Regional Comprehensive Economy Partnership*.

Keadaan yang tidak menentu saat ini dalam dunia ekonomi dan tuntutan dalam meningkatkan perekonomian negara merupakan suatu kondisi yang sangat mendukung munculnya regionalisasi perdagangan dalam perdagangan internasional. Rezim perdagangan internasional yang diharapkan mampu memberikan suasana dan kondisi yang mendukung dalam perdagangan internasional justru tidak berjalan seperti yang diharapkan.

World Trade Organization merupakan suatu rezim perdagangan internasional yang telah lama dibentuk guna mengatur dan memberikan kondisi yang nyaman dalam perdagangan internasional. Harapan yang dialamatkan pada perundingan WTO ini sudah sewajarnya mengingat rezim ini dibentuk dan juga dijalankan oleh mayoritas negara-negara kaya dan makmur.

Banyak sudah regionalisasi yang bermunculan di dunia tidak hanya dalam skala kecil, namun juga sudah merambah ke skala yang lebih besar lagi. *Trans Pacific Partnership*, *Transatlantic Trade and Investment Partnership*, dan yang terbaru adalah perundingan *Regional Comprehensive Economy Partnership* adalah segelintir nama regionalisasi bahkan dapat dibilang segelintir nama mega regionalisasi yang bermunculan dewasa ini untuk memenuhi tuntutan setiap negara

untuk meningkatkan jumlah perdagangannya untuk meningkatkan perekonomian negaranya masing-masing.

Tidak berjalannya kerangka dan hasil perundingan WTO dalam putaran Doha, maka tidak mengherankan jika dewasa ini banyak regionalisasi maupun mega regionalisasi yang bermunculan dalam liberalisasi perdagangan internasional. Fenomena ini sebenarnya upaya yang dilakukan oleh setiap negara untuk meningkatkan perdagangan mereka di luar perundingan WTO yang dinilai banyak pihak telah gagal memformulasikan aturan perdagangan multilateral di dunia.

Disamping tidak berjalannya atau mandegnya perundingan WTO, Kawai dan Wignaraja mengemukakan indentifikasi yang mendasari munculnya atau tumbuhnya kerangka perdagangan bebas regional di luar WTO khususnya Asia. Kawai dan Wignaraja setidaknya mengemukakan 3 indentifikasi mengenai fenomena ini yaitu:¹

1. Dorongan untuk melakukan integrasi perdagangan dari pasar,
2. Trend integrasi regional Amerika dan Eropa yang terjadi,
3. Terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997 dan 1998

Kondisi ini disikapi lebih positif dan optimis oleh blok-blok perdagangan yang telah terlebih dahulu terbentuk seperti ASEAN, Uni Eropa dan NAFTA. Blok-blok perdagangan ini seakan berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan mitra regional lainnya yang akhirnya membentuk sebuah mega regionalisasi.

¹ *Perkembangan Perundingan RCEP dan Peran Bank Indonesia*. Diakses melalui

<https://www.linkedin.com/pulse/perkembangan-perundingan-rcep-dan-peran-bank-ahmad-adi-nugroho>. diakses pada Kamis, 29 Oktober 2015.

Seiring perkembangan dan tututan yang semakin besar dalam perekonomian internasional, trend ataupun gaya perdagangan bebas dewasa ini yang bermunculan tidak hanya dibungkus dalam FTA saja, namun saat ini telah dibungkus dalam balutan kerangka kemitraan ekonomi komprehensif yaitu kerangka kerjasama yang memperluas cakupan area kerjasama lainnya disamping perdagangan barang.²

Setelah fenomena tidak berjalannya putaran Doha dalam perundingan WTO dalam memformulasikan aturan dalam perdagangan multilateral, dan juga fenomena munculnya kerjasama regionalisasi dibanyak kawasn di dunia, saat ini muncul fenomena lain sebagai manifestasi dalam kebutuhan meningkatkan nilai perdagangan setiap negaranya yaitu munculnya mega regionalisasi. Mega regionalisasi adalah wujud lain dari regionalisasi yaitu perluasan partisipasi yang lebih dari 1 blok perdagangan.

Telah banyak muncul mega regionalisasi di dunia saat ini, sebagai contohnya adalah *Trans Pacific Partnership* yang merupakan mega regionalisasi yang awalnya dibentuk oleh 4 negara pasifik yang dikenal sebagai *Pacific-4 (P4)* yaitu Singapura, Chile, Selandia Baru dan Brunei Darussalam. Contoh lain dari terbentuknya mega regionalisme adalah *Transatlantic Trade and Investment Partnership* atau lebih dikenal sebagai TTIP. TTIP sendiri merupakan mega regionalisasi yang beranggotakan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Sebenarnya negara adikuasa ini dan juga kawasan ekonomi Eropa ini telah terlebih dahulu berkolaborasi sejak lama dalam pembentukan beberapa forum maupun organisasi internasional yang saat ini berdiri seperti IMF, OECD, World Bank dan lain sebagainya.

² *Ibid.*

Mega regionalisasi lainnya muncul di kawasan Asia juga. Seperti halnya TPP yang banyak beranggotakan negara Asia, mega regionalisasi yang satu ini beranggotakan semua negara Asia. *Regional Comprehensive Economy Partnership* merupakan mega regionalisasi di kawasan ASEAN. RCEP adalah blok perdagangan yang digagas oleh ASEAN setelah AFTA atau *Asean Free Trade Area*. RCEP merupakan gagasan yang dibicarakan pada saat Indonesia menjadi ketua ASEAN dan dikemukakan oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono dalam forum kepala negara ASEAN pada Bali Summit tanggal 17 November 2011.³

Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa negara bangsa karena pada umumnya setiap kebijakan dan setiap fenomena yang terjadi dalam politik maupun ekonomi internasional, negara bangsa merupakan salah satu aktor yang sangat dominan dalam menentukan suatu kebijakan baik itu kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri.

Pemilihan tingkat analisa ini berdasarkan pada tingkah laku Indonesia dalam KTT ASEAN ke 19 yang menyuarakan mengenai pembentukan suatu kerjasama yang lebih luas dan lebih menguntungkan antara 10 negara ASEAN yang ada dengan 6 negara mitra ASEAN yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru. Kebijakan yang diambil Indonesia dalam pembentukan kerjasama yang lebih luas ini akan mempengaruhi banyak pihak termasuk masyarakat Indonesia sendiri. Unit analisa dalam penelitian ini adalah Indonesia yang dalam hal ini adalah pemerintah Indonesia yang mencanangkan pembentukan *Regional Comprehensive Economy Partnership* dan unit eksplanasinya adalah kerjasama

³ *Ibid.*

Regional Comprehensive Economy Partnership.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan perspektif neoliberal, karena menurut neoliberal negara merupakan aktor utama dalam politik internasional, bahwa negara adalah aktor kesatuan-rasional dan aktor dalam kondisi anarki dunia internasional. Neoliberal juga memandang bahwa negara merupakan aktor rasional yang egois, negara akan selalu berupaya memaksimalkan kepentingan mereka sendiri tanpa memperdulikan keuntungan atau kerugian yang didapat oleh negara lain.⁴

Menurut neoliberal, kebanyakan negara tidak dapat menghidupkan kekayaan endogin yang dapat mencukupi pembiayaan dalam perkembangan ekonomi negara. oleh karena itu, pemerintah perlu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melahirkan keadaan-keadaan ekonomi domestik yang dapat menarik investasi asing ke dalam wilayah negara mereka.⁵

Penulis menggunakan teori kepentingan nasional yang dikemukakan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton yakni:

“The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of these element that constitute the state most vital needs, that include self preservation, interdependence, territorial

⁴ Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984), hlm. 27. lihat pada Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 305.

⁵ Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 80.

integrity, military, security and economic well being.”⁶

Kepentingan nasional adalah suatu hal yang akan sangat diperjuangkan oleh suatu negara dalam melakukan hubungan internasional dengan negara lainnya.

Menurut K.J. Holsti, konsep kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara yang lain, lahir atas alasan-alasan sebagai berikut⁷: (1) Untuk kesejahteraan ekonomi negara. Kerjasama dengan negara lain dapat mengurangi biaya dalam memproduksi produk-produk kebutuhan rakyat yang menjadi keterbatasan negara tersebut, (2) Peningkatan efisiensi pengurangan biaya, (3) Adanya potensi masalah dalam keamanan bersama, dan (4) Mengurangi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan suatu negara yang berdampak pada negara lain.

PEMBAHASAN

Penelitian ini akan mengkaji mengenai alasan Indonesia menggagas perundingan RCEP pada tahun 2011.

Tersendatnya perundingan WTO dalam memformulasikan aturan perdagangan multilateral dalam putaran Doha, membuat banyak negara dituntut untuk dapat meningkatkan nilai perdagangannya. Munculnya fenomena regionalisasi dan mega regionalisasi merupakan akibat dari kebutuhan negara-

⁶ Zepry. 2014. *Kebijakan Perancis Mengusir Etnis Roma Pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy Tahun 2010*. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau Pekanbaru. Hal 16-17.

⁷ K..J. Holsti, *International Politics: A Framework For Analisis* (New Jersey: Prentice, 1995), hlm. 362-363
lihat pada http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/455/jbptunikompp_gdl-putricahay-22720-8-skripsi-i.pdf, diakses pada tanggal 29 Oktober 2015 pukul 22.00 WIB.

negara dalam mencari peluang perdagangan baru yang lebih dari apa yang di fasilitasi oleh WTO, seperti *Forum Trans-Pacific Partnership* (TPP), *Transatlantic Trade and Investment Partnership* (TTIP), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) menjadi beberapa contoh mega-regional yang tumbuh.

KERJASAMA DAGANG ASEAN

Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau *The Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dengan ditandatanganinya ASEAN Declaration oleh negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. ASEAN di bentuk untuk tujuan mempromosikan kerjasama politik dan ekonomi serta stabilitas regional. Brunei bergabung pada tahun 1984, dan Vietnam bergabung sebagai anggota ketujuh pada tahun 1995. Laos dan Burma yang mengakui keanggotaan penuh pada bulan Juli 1997. Kamboja menjadi anggota kesepuluh ASEAN pada tahun 1999. Dengan berlakunya Piagam ASEAN pada tanggal 15 Desember 2008, ASEAN secara resmi menjadi sebuah Organisasi Internasional dan mengambil langkah besar dalam pembangunan masyarakatnya. ASEAN terdiri atas tiga pilar, yaitu: Politik-Keamanan, Ekonomi, dan Sosial-Budaya. Masing-masing pilar memiliki kerangka kerja tersendiri. Setiap tahun diadakan Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN dan pada 1994 ASEAN memimpin dalam pembangunan *ASEAN Regional Forum* (ARF), yang kini memiliki 27 anggota dan bertemu setiap tahun.

Tujuan dibentuknya ASEAN sebagaimana tercantum dalam Deklarasi ASEAN⁸, yaitu:

- Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan untuk memperkuat dasar bagi masyarakat ASEAN yang sejahtera dan damai.
- Untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di wilayah dan patuh terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.
- Untuk mempromosikan kerjasama aktif dan saling membantu dalam hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknis, ilmiah dan administrasi.
- Untuk memberikan bantuan satu sama lain dalam bentuk fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesional, teknis, dan administratif.
- Untuk berkolaborasi lebih efektif untuk pemanfaat lebih besar dari pertanian dan industri, perluasan perdagangan, termasuk studi tentang masalah perdagangan komoditas internasional, peningkatan transportasi dan fasilitas komunikasi dan peningkatan standar hidup masyarakat ASEAN.

⁸ About ASEAN, di akses dari < <http://asean.org/asean/about-asean/>> pada tanggal 20 Juli 2016.

- Untuk mempromosikan studi Asia Tenggara.
- Untuk menjada kerjasama yang erat dan menguntungkan dengan Organisasi Internasional dan regional yang ada dengan maksud dan tujuan yang sama, dan menjelajahi semua jalan kerjasama lebih dekat antara mereka sendiri.

Kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN Free Trade Area/AFTA*) merupakan sebuah persetujuan mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. AFTA bertujuan untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan non-bea dalam ASEAN serta menarik investasi asing ke ASEAN.

| NEGARA | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2-Jan-14 | 30-May-14 |
|-------------------|----------------------------|------|-------|------|--------|----------|-----------|
| Brunei Darussalam | Tidak Memiliki Pasar Saham | | | | | | |
| Kamboja | Tidak Memiliki Pasar Saham | | | | | | |
| Indonesia | 87.9 | 46.9 | 3 | 13.3 | 0.25 | 1.24 | 14.5 |
| Laos | Tidak Memiliki Pasar Saham | | | | | | |
| Malaysia | 45 | 19.5 | 0.8 | 10.3 | 10.54 | -0.75 | 0.34 |
| Myanmar | Tidak Memiliki Pasar Saham | | | | | | |
| Filipina | 60.3 | 55.7 | 1.9 | 21.1 | 62.3 | 1.6 | 12.87 |
| Singapura | 64.5 | 10.1 | -17.1 | 19.7 | 0.24 | 0.23 | 4.05 |
| Thailand | 66.1 | 39.2 | -0.9 | 35.9 | -11.58 | -5.23 | 9.01 |
| Vietnam | 56.6 | -2.8 | -20.9 | 7.7 | 23.06 | -0.02 | 11.37 |

Tabel 1. Indeks Pasar Saham Negara ASEAN, 2009-2014 (y-o-y, %)⁹

Investasi dalam bentuk saham masih menjadi daya tarik kawasan ASEAN. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa negara kawasan ASEAN merupakan tempat tujuan favorit untuk investasi saham. Berbeda dengan kecenderungan pada indikator-indikator ekonomi makro lainnya di kawasan, kinerja pasar saham ASEAN cenderung menunjukkan geliat yang positif.

⁹ASEAN: Tantangan Tekanan Ekonomi Global dan Instabilitas Nasional Menuju AEC 2015. Diakses dari

<http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/asean-tantangan-tekanan-ekonomi-global-dan-instabilitas-nasional-menuju-aec-2015/> pada juli 2016

BENTUK KERJASAMA KAWASAN DAGANG ASEAN

A. ASEAN *Preferential Trade Agreement* (PTA), dibentuk pada 25 Februari 1977, untuk mengembangkan perdagangan di antara negara ASEAN dalam meningkatkan perdagangan mitra kawasan melalui pertukaran tarif preferensi.

B. ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), dibentuk pada tahun 1992, bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara ASEAN guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkesinambungan bagi semua negara anggota ASEAN.

C. ASEAN *Framework Agreement on Services* (AFAS), kesepakatan perdagangan regional ASEAN yang mencakup perdagangan barang dan perdagangan jasa.

D. ASEAN+3, merupakan proses kerjasama perdagangan dan investasi intra ASEAN dan tiga Negara maju Asia yaitu Jepang, Korea Selatan dan China (disebut ASEAN+3) sejak tahun 1997.

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP)

Sebagai wujud respon ASEAN terhadap dinamika ekonomi di kawasan global serta dilandasi pada Pilar ke-4 Cetak Biru (*Blueprint*) Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yaitu integrasi ASEAN dengan perekonomian global, ASEAN memprakarsai pembentukan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dengan Australia, Selandia baru, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Jepang, Korea, dan India. Pembentukan RCEP dilandasi konsep filosofis dan strategik melalui konsolidasi 5 kerja sama FTA ASEAN dengan negara Mitra FTA yang diyakini akan memberikan potensi ekonomi dari integrasi pasar sebesar 3,2 miliar jiwa (45% penduduk duduk) dan kawasan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai USD 20 triliun (28% PDB dunia). Mayoritas negara peserta RCEP

termasuk India, RRT, ASEAN (kecuali Singapura dan Brunei) merupakan negara berkembang yang dominasinya akan terus meningkat dalam perekonomian dunia.

RCEP pertama kali dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-21 di Phnom Penh, Kamboja oleh para pemimpin negara anggota ASEAN dan negara Mitra kerjasama. RCEP dibentuk agar ASEAN dapat bertindak sebagai key driver dalam pengembangan arsitektur kawasan yang bersifat ASEAN-minded, tentunya dengan tetap mengutamakan pembentukan MEA 2015.¹⁰ Pembentukan kerjasama RCEP yang modern, kompetitif, berkualitas tinggi namun tetap mengedepankan prinsip kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan untuk mewujudkan kawasan ekonomi masa depan yang mampu menjadi motor perekonomian dunia.

Sesuai dengan *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the RCEP*, perundingan diselenggarakan sebanyak sepuluh putaran, dimulai pada awal 2013 dan diharapkan selesai akhir tahun 2015. Dipimpin oleh Indonesia, perundingan RCEP didasarkan atas prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan perdagangan yang komprehensif dan saling menguntungkan diantara negara peserta dengan mempertimbangkan tingkat pembangunan di masing-masing negara peserta. Inti dari agenda perundingan RCEP mencakup perdagangan barang, jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknik, kerjasama dibidang persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa.¹¹

¹⁰ Gita Wirjawan, menteri Perdagangan. Diakses dari < [http://mindcommonline.com/ktt-asean-ke-21-hasilkan-regional-comprehensive-economic->](http://mindcommonline.com/ktt-asean-ke-21-hasilkan-regional-comprehensive-economic-) pada Juni 2016

¹¹ RCEP, diakses dari <<http://sumbarprov.go.id/details/news/4951>> pada Juni 2016

RCEP DAN SENTRALITAS ASEAN

ASEAN meningkatkan sentralitas melalui RCEP dan memilih untuk mencapai tujuan ini melalui integrasi, pendekatan yang mempengaruhi kesejahteraan semua negara yang berpartisipasi. ASEAN sebagai kelompok yang telah menjunjung tinggi “*balance of powers*” sejak perang dingin, memperoleh sentralitas dengan membangun beberapa kerangka kerjasama bilateral ‘*self-centered*’ di Asia Timur.

Keuntungan ASEAN sebagai pusat kerjasama Asia Timur terdiri atas dua faktor: pertama, struktur kekuatan khusus di Asia Timur tidak membentuk sumbu kekuasaan di wilayah itu. Di bawah struktur politik, ASEAN membangun kerangka kerjasama *self-centered* dengan strategi diplomatik ‘*balancing power*’. Kedua, ASEAN telah mempromosikan kerjasama regional sejak tahun 1967, dengan memperluas keanggotaan dan ruang lingkup kerjasamanya. Kedua faktor di atas menunjukkan bahwa sentralitas ASEAN tergantung pada kondisi tertentu. Menurut teori ketergantungan, tidak akan ada penantang si Asia Timur yang dapat menggantikan ASEAN sebagai pelopor kerjasama Asia Timur.

Sentralitas fungsional ASEAN di wilayah tergantung pada kemajuan kerjasama di Asia Timur. Ini akan membantu menentukan sensitivitas ASEAN mengenai kerangka kerja sama Asia Timur dan juga membantu menjelaskan mengapa ASEAN menempatkan proses di atas kemajuan. Kata “Sentralitas” telah sering muncul dalam pernyataan ASEAN, membuktikan bahwa ASEAN telah mengakui tantangan yang mendalam dalam menghadapi “sentralitas”nya.

EKONOMI POLITIK INDONESIA DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional tidak terlepas dari pengaruh adanya diplomasi ekonomi yang menguatkan posisi suatu negara untuk menyokong setiap kepentingan nasional. Diplomasi ekonomi merupakan media penyelamat untuk mencapai seluruh kesejahteraan bagi negara yang terlibat dalam hubungan sosial di dunia. Hal ini juga menjadi acuan bagi negara Indonesia untuk mengembangkan Diplomasi ekonominya sebagai bentuk pengakuan pasar komoditas perekonomiannya di dunia internasional. Dalam teknik Diplomasi Ekonomi, Indonesia menerapkan sistem ekonomi politik luar negeri, serta pasar yang mengedepankan cara ekspor dan impor barang-barang ke pasar internasional.

Melalui ekspor impor, negara Indonesia mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berkualitas dengan menciptakan produktivitas barang yang tidak kalah saing patennya dengan produk dari negara-negara berkembang serta negara maju lainnya. Diplomasi Indonesia khususnya merupakan bagian yang kita kenal melalui sistem politik luar negeri Indonesia terhadap pengaruh ekonomi dalam skala internasional.

Untuk melewati semua tahapan mencapai cita-cita perekonomian yang stabil dan menciptakan kepentingan nasional ekonomi yang sangat baik, maka Indonesia memilih untuk masuk ke lingkup organisasi perekonomian yang lebih besar seperti ikut bergabung dengan negara-negara maju melalui WTO dan ASEAN. Melalui organisasi tersebut Indonesia mendapat banyak pelajaran untuk menciptakan suasana bersaing yang kompetitif dimana tiap-tiap negara memiliki cara yang berbeda dalam memamerkan setiap aset yang bisa diperkenalkan menunjang perekonomian negaranya masing-masing.

Dalam organisasi perdagangan dunia, Indonesia merupakan anggota yang cukup aktif. Seperti yang terjadi pada keterlibatan

negara Indonesia dalam proses perundingan DDA yang didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Untuk memperkuat posisi runding, Indonesia bergabung dengan beberapa koalisi, antara lain G-33, G20, NAMA-11, yang memiliki kepentingan yang sama dengan Indonesia. Indonesia terlibat aktif dalam merumuskan posisi bersama yang mengedepankan pencapaian *development objectives* dari DDA. Indonesia juga terlibat aktif terhadap isu-isu yang menjadi kepentingan utama Indonesia, seperti pembangunan, kekayaan intelektual, lingkungan hidup, dan pembentukan aturan WTO yang mengatur perdagangan multilateral. Selaku koordinator G-33, Indonesia juga melaksanakan komitmen dan peran kepemimpinannya dengan mengadakan serangkaian pertemuan tingkat pejabat teknis dan Duta besar / *Head of Delegation, Senior Official Meeting* dan Pertemuan Tingkat Menteri, secara rutin demi tercapainya kesepakatan yang memberikan ruang bagi negara berkembang untuk melindungi petani kecil dan miskin. Sebagai koalisi negara berkembang, G-33 tumbuh menjadi kelompok yang memiliki pengaruh besar dalam perundingan pertanian, anggota saat ini telah 46 negara.¹²

Indonesia sebagai negara yang terlibat dalam kerjasama di kawasan regional Asia tenggara menjadi sorotan terlaksananya setiap visi dan misi dari pencapaian cita-cita ASEAN. Karena regionalisme dalam kawasan Asia tenggara telah menciptakan negara anggota untuk siap meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menyelaraskan perekonomian dengan negara maju lainnya, serta memperkuat kekuatan ekonomi untuk

¹² World Trade Organization. Diakses dari < <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-%28WTO%29.aspx>> pada 21 Juli 2016

menciptakan sikap ketergantungan negara satu dengan negara lainnya. Upaya regionalisme ini sangat positif dimana tujuannya mengupayakan serta mendukung tindakan perekonomian pasar internasional.

Pada tahun 2011, ASEAN diketuai oleh negara Indonesia telah menghasilkan capaian-capaian utama pada ketiga Pilar Komunitas ASEAN. Indonesia senantiasa memastikan implementasi dari keputusan dan kesepakatan yang telah dicapai, serta memastikan pelaksanaan tindak lanjutnya.

Negara Indonesia melakukan kerjasama dengan banyak negara lain yang mencakup di berbagai bidang, seperti bidang Politik, Ekonomi, Sosial-Budaya, Pendidikan, Pertahanan dan Keamanan, serta pada bidang lain. Tujuan dari kerjasama ini tentu tidak lain adalah untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Indonesia cenderung menggunakan kerjasama internasional dengan negara lain untuk melengkapi kebutuhan nasionalnya. Mengenai kegiatan ekspor dan impor, pemerintah telah membagikan kegiatan ekspor menjadi dua kebijakan antara lain, kebijakan ekspor dalam negeri dan kebijakan ekspor luar negeri. Serta kegiatan impor yang meliputi kebijakan tariff dan kebijakan non tariff. Dalam pelaksanaan ekonomi, Indonesia tidak selalu mendapatkan keuntungan atau kenaikan yang signifikan tetapi di sisi lain Indonesia juga mengalami penurunan saat melakukan kerjasamanya.

POSISI INDONESIA DALAM RCEP

Gagasan RCEP merupakan usulan Indonesia saat menjadi ketua ASEAN pada tahun 2011. Indonesia yang ditunjuk sebagai koordinator sekaligus memimpin Komite Perundingan Perdagangan RCEP yang membawahi 16 negara, yaitu 10 negara anggota ASEAN serta Australia, India, Jepang, Korea, China, dan Selandia Baru.

Bagi Indonesia, RCEP merupakan proses lanjutan yang sangat logis setelah *ASEAN Economy Community* pada tahun 2015, dengan mengkonsolidasikan FTA ASEAN+1 yang sudah ada. Indonesia memprioritaskan perundingan RCEP sambil mengamati proses perundingan *Trans Pasific Partnership* (TPP) yang dimotori oleh Amerika Serikat. Pertimbangan lain adalah sejumlah isu runding di dalam TPP belum menjadi prioritas utama bagi Indonesia. Hal-hal yang dirundingkan dalam TPP seperti perpanjangan masa berlaku hak paten bagi obat-obatan tertentu yang diusulkan hingga 150 tahun, liberalisasi ketentuan *government procurement*, pencopotan hak-hak khusus Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau pendisiplinan proses peraturan perundangan, dimana semuanya merupakan kondisi ideal untuk meningkatkan daya saing ekonomi dalam jangka panjang.¹³

PELUANG RCEP BAGI INDONESIA

Pembentukan RCEP akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap struktur dan tatanan mata rantai pasokan serta tingkat ketergantungan ekonomi di kawasan baik bagi negara peserta maupun bagi negara non RCEP. RCEP yang merupakan konsolidasi Asean + 1 FTA adalah perjanjian dengan standar kualitas yang tinggi dan mempunyai manfaat ekonomi secara timbal balik dengan memperluas dan memperdalam kerja sama di bidang ekonomi yang didasarkan kepada FTA yang sudah ada dan berjalan saat ini. RCEP juga didasarkan kepada akses terbuka yang diartikan diberikan fleksibilitas bagi anggota untuk berpartisipasi kemudian.¹⁴

¹³ Indonesia Fokus Selesaikan RCEP di ASEAN. Diakses dari < <http://www.ift.co.id/posts/indonesia-fokus-selesaikan-rcep-di-asean> >

¹⁴ RCEP dan Indonesia. Diakses dari Koran Bisnis.com

Pemberlakuan RCEP akan membuka akses pasar yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Indonesia harus siap dan mampu memasuki pasar, khususnya produk manufaktur dan lainnya yang akan memberikan nilai tambah di Negara- negara peserta RCEP. Kesiapan industri nasional yang menghasilkan produk bernilai tambah merupakan prioritas utama yang harus dilakukan Indonesia agar manfaat RCEP dapat optimal bagi perekonomian Indonesia. Untuk itu, Indonesia juga perlu mendorong investasi dari dalam negeri maupun asing yang masuk guna meningkatkan kapasitas produk yang diproduksi dan daya saing agar mampu memanfaatkan pasar yang ada baik di dalam negeri maupun di negara peserta RCEP lainnya. RCEP memberikan kemudahan bagi negara anggotanya dalam mendapatkan bahan baku industri secara lebih efisien dan ini cukup menjanjikan bagi Indonesia.¹⁵

Indonesia merupakan ekonomi terbesar di ASEAN dan bagi Indonesia, negara-negara yang tergabung dalam RCEP berperan sekitar 62% dari total ekspor Indonesia dan sekitar 67% dari total impor Indonesia pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan menjanjikan baik untuk barang, investasi maupun sektor jasa.¹⁶

Kerjasama RCEP dengan enam negara akan meningkatkan perdagangan Indonesia, dikarenakan potensi pasar RCEP mencapai US\$ 21,6 Triliun. Kekuatan ekonomi 10 negara ASEAN saat ini hanya 5% dari

produk domestik bruto (PDB) dunia atau sekitar US\$ 2,6 Triliun. Dengan RCEP, kekuatan ekonomi negara-negara yang terlibat mencapai 30% dari GDP global atau sebesar US\$ 21,6 Triliun. Pasar RCEP mencakup 3,4 miliar penduduk dari 16 negara. Sebanyak 60% ekspor Indonesia mengarah ke ASEAN dan enam mitra dagang utama, sedangkan impor 58%.¹⁷

Liberalisasi perdagangan barang Asean akan menjamin kelancaran arus barang untuk pasokan bahan baku maupun bahan jadi di kawasan Asean karena hambatan tarif dan non tarif yang sudah tidak ada lagi. Indonesia sebagai salah satu negara besar yang juga memiliki tingkat integrasi tinggi di sektor elektronik dan keunggulan komparatif pada sektor berbasis sumber daya alam, berpeluang besar untuk mengembangkan industri di sektor tersebut di dalam negeri.

Tantangan yang harus dihadapi Indonesia menghadapi perdagangan bebas tidak hanya berada pada permasalahan domestik, tetapi di dalam lingkup internasional khususnya kawasan Asia Tenggara. Kinerja ekspor menunjukkan Indonesia berada pada peringkat ke-4 di kawasan Asean di bawah Singapura, Malaysia dan Thailand pada tahun 2008. Di samping itu, kinerja impor tidak menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai negara penghasil bahan baku dengan berada pada peringkat ke-3 di bawah Singapura dan Malaysia di tahun yang sama. Apabila kondisi daya saing tidak diperbaiki, defisit terhadap negara-negara tersebut akan semakin membesar dan menjadi ancaman yang sangat serius bagi perekonomian Indonesia. Produk-produk yang diciptakan

<<http://koran.bisnis.com/read/20160127/251/513431/rcep-dan-indonesia>> pada Desember 2016

¹⁵ REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP. Diakses dari <<http://sumbarprov.go.id/details/news/4951>> pada Agustus 2016.

¹⁶ RCEP dan Indonesia. Diakses dari Koran Bisnis.com <<http://koran.bisnis.com/read/20160127/251/513431/rcep-dan-indonesia>> pada Desember 2016

¹⁷ Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi. Potensi Pasar RCEP US\$ 21 T. Diakses dari <<http://www.kemenperin.go.id/artikel/10281/Potensi-Pasar-RCEP->>> pada September 2016

oleh negara Asean selama ini menunjukkan kesamaan yang akan berakibat pada persaingan yang cenderung monoton. Indonesia harus secara teliti melihat keadaan ini sebagai peluang atau tantangan, melihat negara ini memiliki sumber daya alam yang lebih dibandingkan dengan negara-negara Asean lainnya. Dengan konsep RCEP, diharapkan mampu meningkatkan posisi tawar dalam perkonomian global bersaing dengan blok-blok integrasi lainnya di luar Asia.¹⁸

Pembentukan RCEP juga menimbulkan beberapa tantangan bagi Indonesia, antara lain:¹⁹

- a. Mendorong peningkatan daya dukung dan kapasitas industri nasional baik barang maupun jasa.
- b. Memperkuat dan memperdalam fundamental struktur ekonomi nasional melalui pengembangan industri-perdagangan-investasi.
- c. Menurunkan biaya ekonomi yang tinggi dan memperbaiki sistem logistik nasional.
- d. Memperbaiki dan meningkatkan sistem nasional diberbagai bidang melalui penyesuaian tata kelola-peraturan-ketentuan serta kebijakan di sektor ekonomi, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur termasuk layanan publik dalam upaya meningkatkan daya saing.
- e. Kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mendorong kinerja ekonomi dalam negeri akan dibatasi dengan adanya integrasi ekonomi Asean. Ini merupakan pengorbanan yang besar

bagi bangsa Indonesia karena tidak menggunakan kebijakan fiskal walau Indonesia menargetkan pendapatan terbesar dari sektor perpajakan.

KEPENTINGAN EKONOMI INDONESIA DALAM RCEP

Perundingan RCEP menitik beratkan pada upaya menyepakati modalitas integrasi ekonomi RCEP untuk tiga isu utama yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, dan investasi. Dalam pertemuan perundingan juga dibahas mengenai isu perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Mempertimbangkan tingkat kesiapan Indonesia dan negara mitra ASEAN lainnya yang masih tertinggal dibandingkan negara mitra, Indonesia sangat berhati-hati dan menekankan kesediaan membahas isu ini hanya dalam konteks kerjasama yang dapat meningkatkan kesiapan Indonesia khususnya UKM dalam mengakses pasar via elektronik. Penekanan ini merupakan hal yang penting mengingat Indonesia sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang perdagangan elektronik dalam mendorong aktivitas perdagangan elektronik termasuk perlindungan konsumen. Transaksi perdagangan elektronik di Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebesar USD 12 Miliar dan pada tahun 2016 akan mencapai USD 20 Miliar.²⁰

Visi Indonesia dalam perundingan RCEP yaitu peningkatan kualitas hidup manusia, peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta perwujudan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Indonesia dengan jumlah

¹⁸ Wahyudin, Dian. Peluang atau tantangan Indonesia menuju Asean Economic Community (AEC) 2015.

¹⁹ REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP. Diakses dari <<http://sumbarprov.go.id/details/news/4951>> pada Agustus 2016.

²⁰ Siaran Pers Kementerian Perdagangan Indonesia. Putaran Perundingan RCEP ke-8 capai sejumlah kemajuan. Diakses dari <<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/06/13/putaran-perundingan-rcep-ke-8-capai-sejumlah-kemajuan-id0-1434212551.pdf>> pada September 2016

penduduk terbesar dan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik di Asia Tenggara, memegang posisi yang cukup sentral dalam mewujudkan RCEP. Sebuah keharusan bagi Indonesia dalam negosiasi yang berlangsung untuk dapat mencapai kesepakatan kebijakan yang mendukung perkembangan kekuatan ekonomi Indonesia. Kehadiran negara industri Jepang, Korea Selatan dan negara yang berkembang pesat, Cina dan India, merupakan kesempatan emas bagi pasar dan prospek ekonomi Indonesia ke depannya.

Pelaku usaha lokal Indonesia 95% adalah Usaha Kecil Menengah (UKM). Pada putaran ketujuh perundingan, Indonesia mengusulkan agar RCEP dapat lebih mendorong keterlibatan UKM dalam mata rantai pasok kawasan maupun global. Banyaknya Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia, dalam negosiasi RCEP, Indonesia menekankan perlunya integrasi dari UKM untuk ikut serta dalam RCEP agar dapat mendorong perekonomian Indonesia yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional. UKM akan dapat perlindungan dari pemerintah sesuai dengan perundingan dan masih dapat berkembang terus karena mendapatkan keistimewaan dan perlindungan dari pemerintah sesuai dengan kemampuan UKM tersebut. Kemudahan yang diberikan seperti kemudahan bea masuk, prosedur kepabean, harmonisasi standar, akses finansial, dan pemberian bantuan teknis peningkatan kapasitas bagi UKM agar dapat meningkatkan kualitas produk.²¹

²¹ POSISI INDONESIA DALAM NEGOSIASI RCEP. Diakses dari <https://www.academia.edu/23756122/Posisi_Indonesia_Dalam_Negosiasasi_RCEP?auto=download> pada Desember 2016.

Jepang, Korea Selatan, India, Australia dan Selandia Baru.

Sesuai dengan teori neoliberalisme, negara tidak dapat menghidupkan kekayaan yang dapat mencukupi pembiayaan dalam perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melahirkan keadaan-keadaan ekonomi domestik yang dapat menarik investasi asing kedalam wilayah negara mereka. Kesejahteraan manusia terbaik dapat terwujud dengan memberikan kebebasan kewirausahaan dan keterampilan individu dalam kerangka kelembagaan yang ditandai oleh hak milik pribadi yang kuat, pasar bebas dan perdagangan bebas. Peran negara adalah menciptakan dan mempertahankan kerangka kelembagaan yang tepat untuk praktek-praktek tersebut.

RCEP yang merupakan gagasan yang dibicarakan pada masa keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011. Konsep ini disepakati oleh setiap pimpinan negara ASEAN dalam mewujudkan sentralitas ASEAN dalam perdagangan. Kerangka kerja ini kemudian disahkan pada KTT ke 19 ASEAN dengan integrasi pada tiga sektor pada pilar ekonomi, yaitu perdagangan barang, jasa dan investasi, serta pembentukan kelompok kerja dan kerangka acuan waktu bagi ketiga sektor tersebut. Perundingan ini dimulai sejak 20 November 2012 di Kamboja dan ditargetkan selesai pada tahun 2015. Setelah perundingan ke 9 cakupan RCEP diperluas pada masalah hak kekayaan intelektual, persaingan usaha dan juga kerjasama ekonomi dan teknis.

Analisa penulis mengenai kepentingan Indonesia dalam RCEP yaitu:

1. Peluang Indonesia dalam RCEP yaitu diberi kemudahan dalam mendapatkan bahan baku industri

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan penulis mengenai penelitian ini maka penulis menyimpulkan beberapa kesimpulan dalam penelitian ini. Keadaan perekonomian dunia yang tidak menentu serta berbagai tuntutan yang mengharuskan negara untuk meningkatkan perekonomiannya sangat mendukung munculnya regionalisasi perdagangan internasional.

Ketidakberhasilan WTO dalam memformulasikan setiap peraturan perdagangan multilateral dalam putaran Doha mendorong semakin banyaknya terbentuk regionalisasi perdagangan. Setiap negara mencari peluang baru yang lebih menjanjikan daripada perundingan WTO dalam meningkatkan jumlah dan nilai perdagangannya. Beberapa mega regionalisasi yang muncul yaitu Trans Pacific Partnership dan Transatlantic Trade and Investment, kemudian dari kawasan Asia muncul RCEP.

Indonesia menerapkan sistem ekonomi politik luar negeri, serta pasar yang mengedepankan cara ekspor dan impor barang-barang ke pasar internasional. pengembangan potensi sumber daya manusia yang berkualitas dengan menciptakan produktivitas barang yang tidak kalah saing dengan produk dari negara-negara berkemabang serta negara maju lainnya. Indonesia cukup aktif dalam berbagai bidang kegiatan ekonomi internasional di kawasan ASEAN, yaitu berbagai FTA yang menjalin kerjasama dengan negara di luar ASEAN seperti Cina,

secara lebih efisien dan cukup menjanjikan bagi Indonesia.

2. Kerjasama RCEP akan meningkatkan perdagangan Indonesia karena potensi ekonomi RCEP mencapai US\$ 21.6 Triliun. Sebanyak 60% ekspor Indonesia mengarah ke ASEAN dan enam mitra dagang lain sedangkan impor 58%.
3. Indonesia ingin meningkatkan kerjasama, khususnya dalam bidang Usaha Kecil Menengah, karena pelaku usaha lokal Indonesia 95% adalah UKM. Indonesia mengusulkan keterlibatan UKM dalam mata rantai pasok kawasan maupun global. Indonesia menekankan peluang integrasi dari UKM untuk ikut serta agar dapat mendorong perekonomian Indonesia yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional.
4. Peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta perwujudan ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik.

Namun, tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia yaitu; (1) ekspor Indonesia berada diposisi ke empat di kawasan ASEAN, (2) impor Indonesia tidak menunjukkan kekuatan Indonesia sebagai negara penghasil bahan baku dengan berada di peringkat ketiga, setelah Singapura dan Malaysia, dan (3) produk yang di produksi oleh negara-negara ASEAN menunjukkan kesamaan yang mengakibatkan pada persaingan yang cenderung monoton.

Dari segi kesiapan, Indonesia masih belum cukup siap untuk menghadapi RCEP. Indonesia berada di urutan ke 34 dari 144 negara diukur dari indeks daya saing global,

daya saing yang rendah, infrastruktur dan konektivitas, serta masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Produk dan barang yang sudah sesuai Standar nasional Indonesia masih terbatas sehingga tidak akan banyak membantu dalam menyaingi barang-barang impor pada saat RCEP berlaku.

Indonesia memiliki peranan yang penting dalam berbagai kegiatan kerjasama multilateral. Pelaksanaan politik luar negeri Indonesia dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Indonesia akan terus menempatkan diri tidak hanya untuk kepentingan nasional namun juga untuk turut berkontribusi menjaga stabilitas kawasan. Salah tujuan pembentukan RCEP adalah untuk mempertahankan sentralitas ASEAN dalam menjaga tata kelola hubungan antar negara di kawasan dari semakin kuatnya pengaruh negara adikuasa seperti Amerika Serikat dan Cina di ASEAN.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

K..J. Holsti, *International Politics: A Framework For Analisis* (New Jersey: Prentice, 1995).

Robert Keohane, *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1984), hlm.

27. lihat pada Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global* (Bandung: Nusa Media, 2012)

Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* (Bandung: Nusa Media, 2010)

SKRIPSI

Zepry. 2014. *Kebijakan Perancis Mengusir Etnis Roma Pada Masa Pemerintahan Nicolas Sarkozy Tahun 2010*. Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Riau Pekanbaru.

WEBSITE

About ASEAN, di akses dari <
<http://asean.org/asean/about-asean/>>

ASEAN: Tantangan Tekanan Ekonomi Global dan Instabilitas Nasional Menuju AEC 2015. Diakses dari <
<http://macroeconomicdashboard.feb.ugm.ac.id/asean-tantangan-tekanan-ekonomi-global-dan-instabilitas-nasional-menuju-aec-2015/>>

Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Bachrul Chairi. Potensi Pasar RCEP US\$ 21 T. Diakses dari <
<http://www.kemenperin.go.id/artikel/10281/Potensi-Pasar-RCEP->>

Gita Wirjawan, menteri Perdagangan. Diakses dari <
<http://mindcommonline.com/ktt-asean-ke-21-hasilkan-regional-comprehensive-economic->>

Indonesia Fokus Selesaikan RCEP di ASEAN. Diakses dari <
<http://www.ift.co.id/posts/indonesia-fokus-selesaikan-rcep-di-asean>>

Perkembangan Perundingan RCEP dan Peran Bank Indonesia. Diakses melalui
<https://www.linkedin.com/pulse/perkembangan-perundingan-rcep-dan-peran-bank-ahmad-adi-nugroho>.

POSISI INDONESIA DALAM NEGOSIASI RCEP. Diakses dari <
https://www.academia.edu/23756122/Posisi_Indonesia_Dalam_Negosiasi_RCEP?auto=download>

RCEP, diakses dari <
<http://sumbarprov.go.id/details/news/4951>>

RCEP dan Indonesia. Diakses dari Koran Bisnis.com <
<http://koran.bisnis.com/read/20160127/251/513431/rcep-dan-indonesia>>

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP. Diakses dari <
<http://sumbarprov.go.id/details/news/4951>>

RCEP dan Indonesia. Diakses dari Koran Bisnis.com <
<http://koran.bisnis.com/read/20160127/251/513431/rcep-dan-indonesia>>

REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP. Diakses dari <
<http://sumbarprov.go.id/details/news/4951>>

Siaran Pers Kementerian Perdagangan Indonesia. Putaran Perundingan RCEP ke-8 capai sejumlah kemajuan. Diakses dari
<http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/06/13/putaran-perundingan-rcep-ke-8-capai-sejumlah-kemajuan-id0-1434212551.pdf>

Wahyudin, Dian. Peluang atau tantangan Indonesia menuju Asean Economic Community (AEC) 2015.

World Trade Organization. Diakses dari <
<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/World-Trade-Organization-%28WTO%29.aspx>>